



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



KECAMATAN SINDANGWANGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, Februari 2024
Kecamatan Sindangwangi
Kabupaten Majalengka



WAHYU SUDIANTO, S.IP.
Penata Tingkat I
NIP. 19830425 201001 1 010



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

DATA KEPEGAWAIAN

ISU STRATEGIS

SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PERKIN 2023

RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN



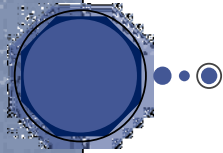
BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi





BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Sindangwangi setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Sindangwangi Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Sindangwangi

- a. Kedudukan
- b. Tugas dan Fungsi
- c. Bagan Struktur Organisasi

Untuk mengisi poin-poin di atas, dapat melihat dokumen berikut:

Berdasarkan Peraturan Bupati No 45 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sindangwangi merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 18 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 5
Laki-laki : 13

b. Eselon

Eselon II a:

Eselon II b:

Eselon III a: 1

Eselon III b: 1

Eselon IV a: 4

Eselon IV b: 2

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS		3	14	1
PPPK				

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi:

Jabatan Administrator: 2

Jabatan Pengawas: 6

Jabatan Fungsional :

Jabatan Pelaksana : 10

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
		5			2	11		

INFOGRAFIK ASN KECAMATAN SINDANGWANGI



II B	-
III A	1
III B	1
IV A	4
IV B	2

Eselon

PNS			
I	II	III	IV
-	3	14	1
PPPK			
I	II	III	IV
-	-	-	-

Golongan

Jenis Jabatan

STRUKTURAL

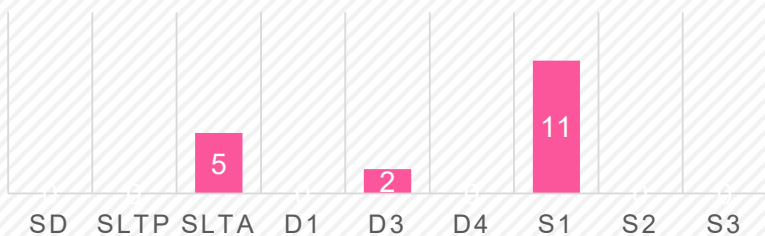


PELAKSANA



FUNGSIONAL

Pendidikan



1.3 Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan OPD Kecamatan Sindangwangi yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan akan dibagi menurut kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi.

1.3.1. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Penduduk Kecamatan Sindangwangi sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah yang terdiri dari 10 Desa , jumlah penduduk adalah 35.336 Jiwa terdiri dari 17.523 Laki-laki dan 17.813 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 9.904 KK, jumlah Keluarga Miskin (GAKIN) sebanyak 2.752 KK , penduduk Kecamatan Sindangwangi seluruhnya beragama Islam. Dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Sindagwangi termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Namun demikian, jumlah warga miskin Kecamatan Sindangwangi masih cukup besar yang diperkirakan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya kesadaran akan pendidikan.

Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, perlu adanya pembinaan/pelatihan ketrampilan.

1.3.2. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan Kecamatan Sindagwangi ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya adalah :

a. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Sindagwangi

Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas.

b. Kinerja Pelayanan Pendidikan

Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah , sebaran dan daya tampung sekolah negeri masih kurang, terutama sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Kecamatan Sindagwangi memiliki 23 SD negeri, 3 SMP negeri, 3 MTS dan memiliki 1 SMA Negeri serta 1 SMK Swasta. Selain itu biaya pendidikan untuk level pendidikan menengah masih relatif tinggi dan belum terjangkau sebagian masyarakat. Kecamatan Sindagwangi juga belum memiliki perpustakaan daerah sebagai sarana edukasi dan informasi bagi masyarakat.

c. Kinerja Pelayanan Kesehatan

Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat belum proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level posyandu dan puskesmas. Terdapat 1 Puskesmas di wilayah Kecamatan Sindagwangi dan kedepan membutuhkan Puskesmas 24 jam yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

d. Kinerja dan Potensi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Kecamatan Sindangwangi secara umum telah memiliki jaringan transportasi yang cukup baik. Selain itu, Kecamatan Sindangwangi juga memiliki jaringan listrik dan telekomunikasi yang terdistribusi cukup merata.

Namun demikian, untuk mengakomodasi pergerakan penduduk Kecamatan Sindangwangi, ruas dan kapasitas jalan yang ada masih terbatas sehingga berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga perlu adanya pelebaran jalan akses ke Kecamatan Sindangwangi, angkutan kota pun belum menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan Sindangwangi.

e. Ketersediaan Perumahan dan Sarana Prasarana Dasar Pemukiman

Kecamatan Sindangwangi termasuk daerah rawan bencana longsor karena merupakan daerah pegunungan dan perbukitan, banyak penduduk yang mendirikan pemukiman di atas perbukitan yang rawan sekali terjadi longsor, oleh karena itu perlu adanya pembinaan dan penanggulangan bencana longsor.

Cakupan layanan persampahan juga masih rendah dan kurangnya dorongan maupun kesadaran penduduk untuk mengelola sampah sendiri sehingga timbunan sampah dapat ditemui hingga ke badan sungai.

Keberadaan sarana dan prasarana olahraga serta juga ruang terbuka hijau skala lingkungan untuk sarana sosialisasi masyarakat terbatas pada kawasan pemukiman penduduk.

1.3.3. Aspek Perekonomian

Permasalahan dari sisi ekonomi dapat diformulasikan ke dalam beberapa aspek :

a. Pergeseran Basis Perekonomian Kecamatan Sindangwangi ke Sektor Pariwisata, Perkebunan dan Pertanian

Perkembangan sektor tersier Kecamatan Sindangwangi merupakan suatu keunggulan, namun tanpa ditopang kekuatan sektor primer dan sekunder, Desa Ujungberung, Jerukleueut, Padaherang dan Bantaragung merupakan proiritas sektor perkebunan dan wisata di Kecamatan Sindangwangi. Pertumbuhan sektor ini juga menjadi rentan tatkala tidak didukung oleh daya beli masyarakat. Dominasi perkembangan sektor tersier ini turut menjelaskan terkonsentrasinya kutub pertumbuhan ekonomi.

b. Kinerja dan Potensi Sektor IKM, UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif dalam Peningkatan Perekonomian Daerah

Pengembangan komoditas unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum signifikan, diantaranya karena beberapa regulasi bidang ekonomi belum tersedia seperti aturan penanaman modal dan investasi daerah serta aturan keberpihakan pengusaha besar terhadap UMKM, belum adanya pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha kecil dan mikro serta fokus pengelolaan produk unggulan khas Majalengka khususnya Kecamatan Sindangwangi. Kecamatan Sindangwangi memiliki potensi produk unggulan berbahan baku melinjo dan Telur Itik, juga kerajinan rotan yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Akibatnya, usaha kecil menengah (UKM) masih belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di samping pertumbuhannya yang masih menghadapi banyak kendala baik dalam akses permodalan, akses pasar, akses teknologi. Berkaitan dengan pemodalan, sebetulnya Kecamatan Sindangwangi memiliki beberapa koperasi aktif yang dapat menjadi sarana penyaluran modal usaha. Namun peran koperasi tersebut belum optimal, akibat berbagai faktor.

c. Kinerja dan Potensi Keterlibatan Stakeholder dan Pelaku Ekonomi Lain dalam Pembangunan Ekonomi

Untuk membangun perekonomian Kecamatan Sindagwangi, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pelaku ekonomi. Hingga saat ini, pelibatan peran swasta lokal dalam mendinamisasi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan belum jelas. Padahal, mereka berpeluang untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha yang menjanjikan seperti usaha wisata, perkebunan, perikanan, pertanian dan jasa lainnya baik dalam skala regional maupun global. Jangan sampai peluang tersebut justru diisi oleh investor luar yang dominan pada sektor-sektor ekonomi tertentu karena kekuatan modal sehingga hasil-hasil pembangunan di Kecamatan Sindagwangi tidak dinikmati oleh penduduknya sendiri.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

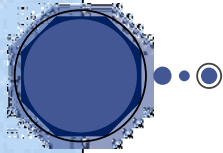
Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Sindangwangi serta SK Tim Penyusunan LKIP.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Adanya berbagai rencana pembangunan strategis yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sindangwangi menempati posisi yang sangat strategis sebagai pendukung pertumbuhan pembangunan Kabupaten Majalengka. Pembangunan Kecamatan Sindangwangi pada tahap pertahap selama 5 (lima) Tahun kedepan memerlukan perhatian terutama dalam mengantisipasi dan mengsikapi perubahan – perubahan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan.

Dalam mensikapi dan mengantisipasi daripada perubahan tersebut Pemerintahan Kecamatan Sindangwangi mempunyai berbagai rencana stratejik yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat, serta dapat membantu pemasukan PAD Tingkat Kabupaten Majalengka .

Berbagai permasalahan yang mesih dihadapi oleh Kecamatan Sindangwangi terutama tingkat kemiskinan sebagai dampak dari internal maupun sebagai dampak global adalah merupakan tantangan kedepan yang perlu dipecahkan bersama melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat yang didukung oleh masyarakat Sindangwangi.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Majalengka **RAHARJA “Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka Yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera Pada Tahun 2023”**, sertadalam mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka **Ke-4 “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Majalengka Yang Bahagia Lahir dan Batin”**,

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	78						78				
			Konflik yang ditindaklanjuti dengan baik	Persen	100						100				
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang diberdayakan	Lembaga	20						20				
			Jumlah Lembaga Ekonomi Desa	Bumdes	10						10				
		Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	Angka Kemiskinan	Persen		20,47	1	1	1		28,47	1	1		
		Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	Persen		20	20	20	20		20	20	20		
		Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Jumlah Desa Tematik	Desa		10	10	10	10		10	10	10		
		Meningkatnya	Jumlah Desa	Desa		10	10	10	10		10	10	10		

		status kemajuan kemandirian desa	Yang Meningkatkan Status Perkembangannya											
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen		78,40	78,60	78,60	77		78,40	78,60	78,60	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persen			100	100	100			100	100	
		Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai										77

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sector	Angka Kemiskinan	1
	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	20
	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Jumlah Desa Tematik	10
	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Jumlah Desa Yang Meningkatkan Status Perkembangannya	10
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77
	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	100

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Nilai

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.274.583.001,00	87,88
Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan public	70.000.000,00	2,70
Program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	0	0
Program koordinasi ketentraman dan Ketertiban umum	0	0
Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	134.175.000,00	5,19
Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	109.450.000,00	4,23
Jumlah	2.588.208.001,00	100,00

BAB 3

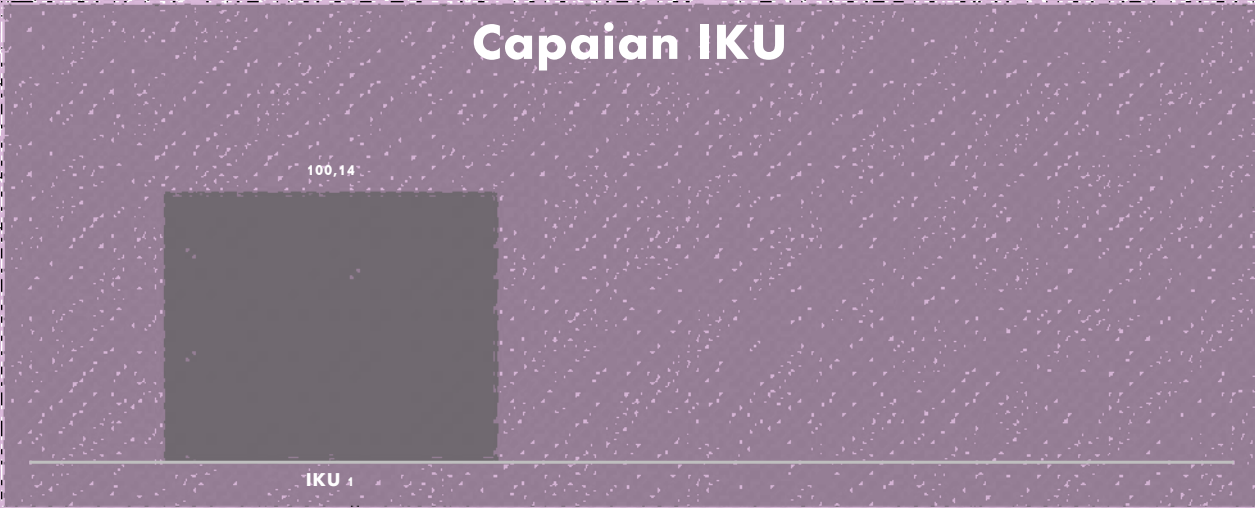
AKUNTABILITAS KINERJA

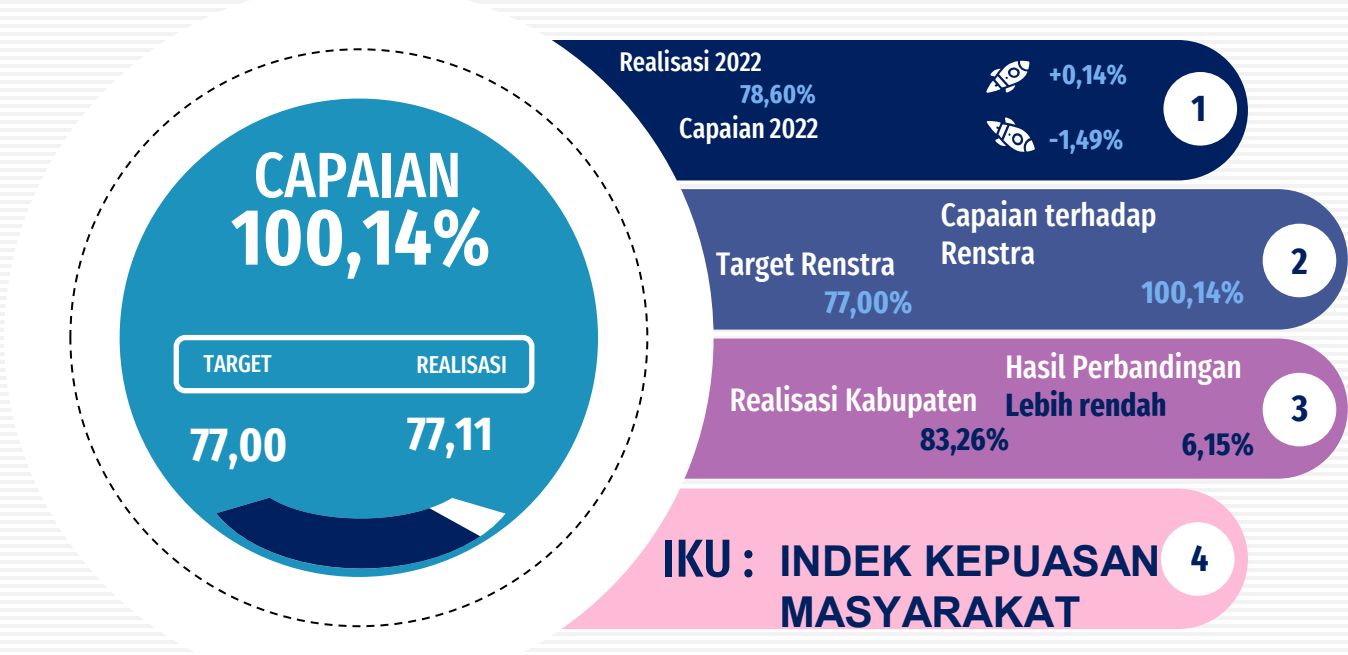
Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Pelayanan Publik Lebih dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100,14%. Sebanyak 1 indikator melebihi target kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 0 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :





FAKTOR

- Perencanaan dan Anggaran
- Penguatan Internal

PROGRAM

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan publik
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan
- Program koordinasi ketentraman dan Ketertiban umum
- Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
- Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa

EFISIENSI

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak ada karena IKU tidak tercapai



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukutan capaian kinerja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100%. Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 0 Indikator tidak mencapai 100%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Dengan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka keberpihakan birokrasi pada kepentingan pemerintah akan menjadi lebih besar dan dapat mempertahankan netralitasnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal birokrasi.

Laporan akuntabilitas instansi pemerintah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah/daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi secara berjenjang sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pengukuran kinerja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dilaksanakan untuk melihat sejauh mana capaian hasil yang diharapkan, sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja digunakan untuk membandingkan rencana kinerja yang merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh personil Kecamatan Sindangwangi dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun. Lebih jauh lagi, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar capaian kinerja dengan tahun - tahun sebelumnya, dengan target yang telah ditetapkan serta sejauh mana pencapaian visinya. Hal terpenting yang diperlukan dalam menyusun laporan capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja, evaluasi dan penyajian secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada semua pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Terhadap capaian kinerja kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan. Analisis capaian kinerja terutama dilakukan apabila terjadi celah kinerja yang cukup signifikan antara target dan realisasinya, dan antara capaian realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, terhadap kekurangan yang terjadi ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Tabel 3.1
Predikat Nilai Pencapaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Predikat	Kode Warna
1	➤ 100 %	Melebihi target	
2	= 100 %	Sesuai Target	
3	< 100 %	Tidak mencapai target	

Kemudian setiap capaian kinerja akan diukur dan dikategorikan berdasarkan kriteria sebagai mana tabel berikut ini :

Kriteria Nilai Pencapaian Kinerja

URUTAN	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA	Kode Warna
1	➤ 90	Sangat Baik	
2	75,00 – 89,99	Baik	
3	65,00 – 74,99	Cukup	
4	50,00 – 64,99	Kurang	
5	0,00 – 49,99	Sangat Kurang	

Kemudian setiap capaian kinerja akan diukur dan dikategorikan berdasarkan kriteria sebagai mana tabel berikut ini :

Pengukuran Kinerja

Kecamatan Sindangwangi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih dekat dan Berkualitas	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	77,11	100,14

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Dalam rangka mengukur kinerja dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, IKU merupakan hal yang pertama kali harus ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai kinerja utama yang terdapat dalam tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Pembahasan Capaian Kinerja, kebijakan dan strategi Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur sebagai mana telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023. Lebih lanjut akan diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Sebagai berikut :

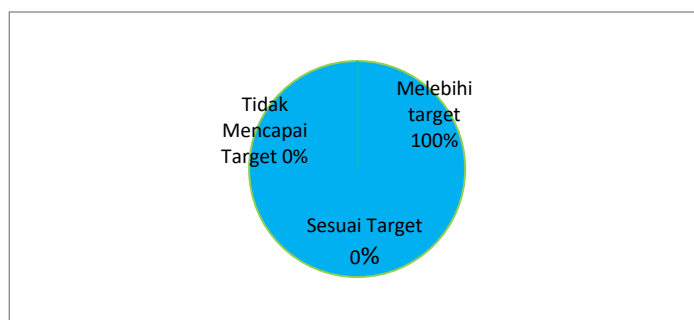
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan Publik Lebih dekat dan Berkualitas	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	77,11	100,14

Berdasarkan uraian capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dijelaskan di atas, dari Indikator Kinerja Kecamatan Sindangwangi Tahun 2023, 1 indikator “Melebihi Target”, 0 indikator “Sesuai Target” dan 0 indikator “Tidak Mencapai Target”

Rekapitulasi Predikat Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sindangwangi Tahun 2023

No	Predikat	Jumlah	%
1	Melebihi Target	1 indikator	100,14
2	Sesuai Target	0 indikator	0
3	Tidak Mencapai Target	0 indikator	0

Predikat Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sindangwangi Tahun 2023



Selain mengukur capaian indikator kinerja berdasarkan predikat capaian kinerjanya, setiap indikator kinerja utama diukur dan dikelompokkan berdasarkan kriteria kinerjanya. Adapun hasil pengukuran capaian indikator kinerja

menunjukkan bahwa dari 1 (Satu) indikator kinerja Kecamatan Sindangwangi Tahun 2023, 1 (Satu) indikator kinerja termasuk dalam kriteria “sangat baik”. Rekapitulasi kriteria pencapaian kinerja dari setiap indikator kinerja utama digambarkan dalam tabel berikut :

**Rekapitulasi Kriteria Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sindangwangi Tahun 2023**

No	Capaian Kinerja	Kriteria	Jumlah Indikator	%
1	➤ 90	Sangat Baik	1	100
2	75,00 – 89,99	Baik	-	-
3	65,00 – 74,99	Cukup	-	-
4	50,00 – 64,99	Kurang	-	-
5	0,00 – 49,99	Sangat Kurang	-	-
Jumlah Total			1	100

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel dan grafik mengenai pengukuran pencapaian indikator kinerja utama di atas, berikut akan diuraikan penjelasan faktor-faktor yang mendukung tercapainya indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sindangwangi Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target kinerja Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala Kecamatan. Tingkat capaian kinerja Program ini adalah 100,00%, predikat capaian “Sesuai Target” dan kriteria pencapaian “Sangat Baik”. Tercapainya target indikator kinerja utama ini didukung oleh adanya sumber dana selain yang terdapat dalam APBD Kabupaten Majalengka.



2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan, Tingkat capaian indikator ini 100,00%, predikat capaian “Mencapai Target”, kriteria “Sangat Baik”. Program dan Kegiatan penunjang indikator ini.



3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja program Capaian Sakip Perangkat Daerah, Tingkat capaian indikator ini 100,00%, predikat capaian “Mencapai Target” dan kriteria “sangat baik”. Program dan Kegiatan pendukungnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

NILAI IKM		NAMA LAYANAN : PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	
<h1>77,11</h1>		RESPONDEN	
JUMLAH	: 48	ORANG	
JENIS KELAMIN	: L = 30	ORANG	P = 18 ORANG
PENDIDIKAN	: SD = 2	ORANG	
	SMP = 4	ORANG	
	SMA = 33	ORANG	
	DIII = 3	ORANG	
	S1 = 6	ORANG	
	S2 = 0	ORANG	
PERIODE SURVEI = 1-06-2023 S.D 15-06-2023			

Keterangan :

A (Sangat baik) : 88,31 - 100,00
 B (Baik) : 76,61 - 88,30
 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,yaitu dengan target kinerja program Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat Kecamatan. Tingkat capaian indikator ini 100,00%, predikat capaian “Mencapai Target” dengan kriteria “Sangat Baik”. Program dan Kegiatan pendukungnya adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.



5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja program yaitu Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Tingkat capaian indikator ini 100,00%, predikat capaian “Mencapai Target” dan kriteria “Sangat Baik”.



6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja program yaitu Persentase desa yang meningkat status perkembangannya, Tingkat capaian indikator ini 100,00%, predikat capaian “Mencapai Target” dan kriteria “Sangat Baik”.



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih dekat dan Berkualitas	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,11	0	Peningkatan

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih dekat dan Berkualitas	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,11	77	100,14

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Kabupaten	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih dekat dan Berkualitas	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,11	83,26	-6,15

5. **Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan **upaya yang telah dilakukan** dan **upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

Pada umumnya, semua target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah dapat dicapai oleh Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka. Hal ini disebabkan oleh adanya political will yang kuat dari kepala daerah untuk memberikan dukungan anggaran, dan kerja keras Kepala Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka beserta jajarannya. Adapun target yang tidak tercapai jika dibandingkan dengan target nasional .

Kecamatan Sindangwangi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan di Pelayanan Umum

Kecamatan Sindangwangi melaksanakan setiap program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari capaian target kinerja yang hampir seluruhnya tercapai. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran dari setiap program dan kegiatan yang direalisasikan tanpa mengurangi output yang dihasilkan.

6. **Program** yang menunjang keberhasilan/kegagalan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PENGAMPU	ANGGARAN (Rp)
	BELANJA DAERAH		2.588.208.001
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat	2.274.583.001
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subbag KPEP	14.800.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.800.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.054.381.001
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.049.581.001
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2.800.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		46.296.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.970.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15.258.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		19.200.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.468.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.400.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		154.456.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		45.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		109.456.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-
	Pengadaan Mebel		-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.650.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.250.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		400.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		70.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kesos	20.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		20.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		50.000.000
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kesos	-
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kesos	50.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pem	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		-

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi pem	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kasi PPM	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi PPM	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Trantib	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kasi Trantib	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		134.175.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		134.175.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kasi Kesos	29.875.000
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kasi Kesos	104.300.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		109.450.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		109.450.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kasi Pem	4.950.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kasi Pem	90.405.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kasi PPM	5.750.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kasi PPM	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kasi Pem	8.345.000

7. **Efisiensi** anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Index Kepuasan Masyarakat (IKM) pada sasaran Pelayanan Publik Lebih dekat dan Berkualitas yaitu 100% atau sebesar Rp 2.588.208.001 dari pagu anggaran Rp 2.588.208.001 dengan realisasi Rp. 2.440.782.201

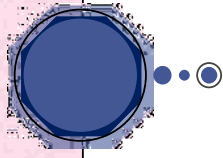
Efisiensi anggaran jika IKU **tidak mencapai** 100%

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Index Kepuasan Masyarakat (IKM) pada sasaran Pelayanan Publik Lebih dekat tidak ada karena IKU hanya mencapai 100%.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Pelayanan Publik Lebih dekat dan Berkualitas	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,14	94.30



BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

LAKIP Kecamatan Sindangwangi Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, selain itu laporan ini memuat pula hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Sindangwangi dalam memenuhi target kinerja pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sindangwangi pada Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Pada tahun 2023 Kecamatan Sindangwangi menetapkan 1 (Satu) sasaran dengan 1 (Satu) indikator kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh sasaran telah dapat direalisasikan dengan kriteria capaian "**Sangat Baik**" dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai **100.14%**. Adapun secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan Publik Lebih dekat dan Berkualitas	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	77,11	100,14

Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun 2023 yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator yang belum memenuhi target, Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka akan mengusahakan berbagai cara yang mungkin untuk ditempuh.

Pada Tahun 2023, Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka telah melaksanakan 6 Program 14 kegiatan 27 Sub Kegiatan yang didukung anggaran Belanja Langsung dari APBD kabupaten, sebesar Rp. 2.588.208.001,- (*Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Satu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.440.782.201,- (*Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Satu Rupiah*) atau sebesar 94.30%

Selanjutnya, penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai bahan acuan dalam menyusun program dan kegiatan untuk tahun berikutnya, sehingga dapat lebih baik agar tujuan yang ditetapkan tercapai.

Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

Majalengka, Februari 2024

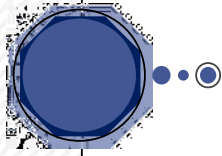
CAMAT SINDANGWANGI



WAHYU SUDIANTO, S.IP.

Penata Tingkat I

NIP. 19830425 201001 1 010



LAMPIRAN

PERKIN

CASCADING

BUKTI SEBAR LAKIP

PRESTASI PD

SK TIM LAKIP



PERKIN



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BANI FADILAH RANANDAR, S.STP., M.AP.**

Jabatan : Camat Sindangwangi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,



BANI FADILAH RANANDAR, S.STP., M.AP.
NIP. 19860327 200412 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SINDANGWANGI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenteram dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	90 - 100 %
		Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 - 100 %
		Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	5 - 10 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.662.660.735,00	APBD
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 54.495.000,00	APBD
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 6.300.000,00	APBD
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 8.200.000,00	APBD
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 148.350.000,00	APBD
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 119.600.000,00	APBD
JUMLAH	Rp 2.999.605.735,00	

Bupati Majalengka,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023

Camat Sindangwangi,



BANI FADILAH BANANDAR, S.STP., M.AP.
NIP. 19860327 200412 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYU SUDIANTO, S.IP.**

Jabatan : Camat Sindangwangi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, November 2023

Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Pihak Pertama,



WAHYU SUDIANTO, S.IP.
NIP. 19830425 201001 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN SINDANGWANGI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.274.583.001,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 70.000.000,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 0,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 0,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 134.175.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 109.450.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 2.588.208.001,00	

Bupati Majalengka,



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023

Camat Sindangwangi,

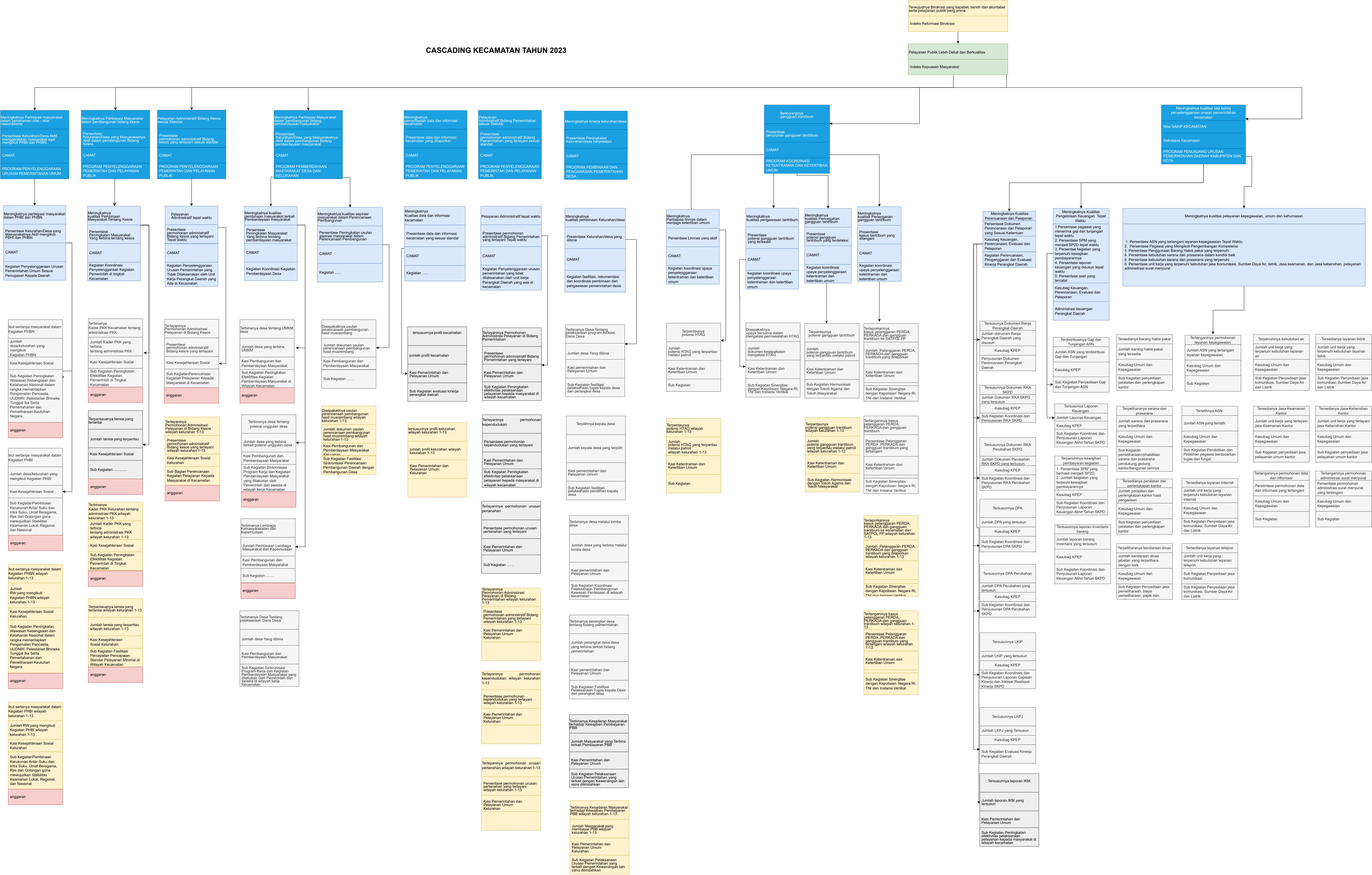


WAHYU SUDIANTO, S.IP.
NIP. 19830425 201001 1 010



CASCADING

CASCADING KECAMATAN TAHUN 2023



Terdapatnya Birokrasi yang transparan, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Indeks Reformasi Birokrasi

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas itifa kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan

Nila SAKIP KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA

Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan

1. Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu
2. Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
3. Persentase Penggunaan Barang Habis pakai yang terpenuhi
4. Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik
5. Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi
6. Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Jasa keamanan, dan Jasa kebersihan, pelayanan administrasi surat menyurat

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu

1. Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu
 2. Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu
 3. Persentase kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya
 4. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
 5. Persentase aset yang tercatat
- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan

- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



BUKTI SEBAR LAKIP



Kecamatan Sind...

Abdul Rachmat, Adi, Atrina...



11.27



Pa Camat Wahyu

11.28



Pa Sulaeman Kurdi Sekcam



11.40



LAKIP KEC
SINDANGWANGI TAH...

1,8 MB • PDF



Assalamualaikum,
Bersama Ini Kami sampaikan
hasil penyusunan LAKIP
Kecamatan Sindangwangi Tahun
2023

13.44 ✓

1 pesan belum dibaca



Pa Camat Wahyu

Walaikumsallam, nuhun a

13.45



Ketik pesan





PRESTASI PD





SK TIM LAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN SINDANGWANGI

Jalan Desa Sindangwangi No. 02 Majalengka Telp (0233) 510276Majalengka

KEPUTUSAN CAMAT SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

CAMAT SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sindangwangi Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Camat Sindangwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri.....3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
19. Peraturan Bupati Majalengka Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Majalengka Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :** Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Camat Sindangwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sindangwangi
pada tanggal : 11 Januari 2024

CAMAT SINDANGWANGI
Kabupaten Majalengka,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Seksi di Lingkungan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT SINDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 03 Tahun 2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	:	Camat Sindangwangi Kabupaten Majalengka
2.	Ketua	:	Sekretaris Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka
3.	Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka
4.	Anggota	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka
			2. Kepala Seksi Ketentramana dan Ketertiban Umum Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka
			3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka
			4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka
			5. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka

Camat Sindangwangi
Kabupaten Majalengka,



WAHYU SUDIANTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT SINDANGWANGI KABUPATEN
MAJALENGKA

NOMOR : 03 Tahun 2024
TANGGAL : 11 Januari 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMQATAN SIDANGWANGI KABUPATEN MAJALENGKA**

I. Penanggung Jawab

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.

II. Ketua

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sidnangwangi Kabupaten Majalengka.
3. Membuat Laporan Pelaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.

III. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.
2. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.

IV. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka.

Camat Sindangwangi
Kabupaten Majalengka,



Wahyu Sudianto

WAHYU SUDIANTO